



LIMA PERSEN PEMILIH BELUM KANTONGI E-KTP DPS Pilwali Ditetapkan 303.034 Pemilih

YOGYA (KR) - Usai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data pemilih pada 8 September hingga 7 Oktober 2016, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilwali akhirnya berhasil ditetapkan. Dari 345.297 pemilih yang tercantum dari daftar awal, jumlah pemilih yang memenuhi kriteria diputuskan sebanyak 303.034 orang.

"DPS ini sifatnya masih sementara. Kami masih akan melakukan pengumuman serta tanggapan dari masyarakat pada 10-19 November 2016. Sehingga masih sangat memungkinkan bertambah maupun berkurang," ungkap Ketua KPU Kota Yogya, Wawan Budiyanto, usai rapat pleno penetapan DPS, Senin (31/10).

Oleh karena itu, jika dibandingkan dengan daftar awal, maka jumlah DPS kali ini berkurang sejumlah 42.263

orang. Wawan mengaku, pengurangan tersebut didasarkan pada hasil coklit setelah melakukan verifikasi ke lapangan. Sebagian besar karena sudah pindah domisili, meninggal, belum cukup umur dan lain sebagainya.

Sedangkan dari total 303.034 pemilih, didominasi kaum perempuan yakni 157.790 pemilih, sementara laki-laki 145.244 pemilih. Di samping itu, pemilih pemula atau yang baru akan pertama kalinya

menggunakan hak pilih pada 15 Februari 2017 sebanyak 8.515 pemilih.

Selain itu, dari hasil coklit juga ditemukan ada sekitar lima persen pemilih yang belum mengantongi KTP elektronik atau e-KTP. Totalnya mencapai 15.483 pemilih. "Pemilih yang belum mengantongi e-KTP tidak hanya berasal dari pemilih pemula saja, tapi juga disebabkan hal lain seperti warga belum melakukan perekaman data kependudukan," urainya.

KPU Kota Yogya bakal berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Yogya terkait pemilih yang belum memiliki e-KTP tersebut. Diharapkan, Dindikcapil dapat melakukan pengecekan di basis data kependudukan.

Wawan menambahkan, bagi calon pemilih yang belum mengantongi e-KTP akan diberikan tenggat waktu hingga 27 November 2016. Jika sampai batas waktu tersebut belum dapat menunjukkan e-KTP maupun surat keterangan bukti perekaman dari Dindikcapil, maka terancam akan dicoret dari DPS. "Kami akan tetap berupaya menyelamatkan hak pilihnya. Tetapi ada aturan harus ber-KTP elektronik, maka yang belum merekam harus segera merekam," tandasnya.

Sementara itu, usai 27 November 2016, komisioner KPU akan kembali melakukan validasi data pemilih. Selanjutnya pada 6 Desember 2016, Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditargetkan sudah berhasil ditetapkan. (Dhi)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005